

Kewajaran Pengalokasian Anggaran Berbasis Analisis Standar Belanja (ASB) pada Pemerintah Kota Padang

Putri Intan Permata Sari¹, Dodi Suryadi²✉

^{1,2}Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

dodisuryadi@upiypk.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the fairness of expenditure in Coordination activities and Preparation of Performance Achievement Reports and Overview of SKPD Performance Realization using the Standard Expenditure Analysis (ASB) method in the Padang City Government for Fiscal Year 2022. Of the 43 SKPDs in the Padang City Government, only 19 SKPDs are can continue to be researched. The stages of preparing the ASB are by inputting data and grouping similar data, determining cost drivers, creating a regression equation, determining the average, upper limit and lower limit, and analyzing the reasonableness of the costs of the ASB model that has been prepared. As for the preparation of the ASB model using SPSS with the regression equation obtained is $Y = \text{Rp } 7,116,556 + 86,035X$, where Based on this equation, there are 5 underfinancing SKPDs, 6 overfinancing SKPDs, and 8 SKPDs that get fair value.

Keywords: Budget, Fairness, Expenditure Standard Analysis, Coordination, Preparation of Performance Achievement Reports

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajaran belanja pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD menggunakan metode Analisis Standar Belanja (ASB) pada Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2022. Dari 43 SKPD yang terdapat pada Pemerintah Kota Padang, hanya 19 SKPD yang dapat dilanjutkan untuk diteliti. Tahapan penyusunan ASB ini adalah dengan melakukan input data serta pengelompokan data yang sejenis, menentukan cost driver, membuat persamaan regresi, menentukan rata-rata, batas atas, dan batas bawah, dan menganalisis kewajaran biaya dari model ASB yang telah disusun. Adapun penyusunan model ASB menggunakan SPSS dengan persamaan regresi yang didapatkan adalah $Y = \text{Rp } 7.116.556 + 86.035X$, dimana X adalah Jumlah Dokumen/Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang merupakan cost driver dari kegiatan ini. Berdasarkan persamaan tersebut terdapat 5 SKPD underfinancing, 6 SKPD overfinancing, dan 8 SKPD yang mendapatkan nilai wajar.

Kata kunci: Anggaran, Kewajaran, Analisis Standar Belanja, Koordinasi, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja.

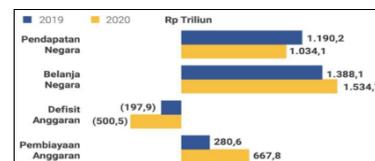
INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Anggaran merupakan alat yang sangat penting dalam pemerintahan baik untuk pembangunan sosial ekonomi, kesinambungan yang terjamin, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam praktiknya, permasalahan mengenai anggaran ini selalu berulang mulai dari perencanaan anggaran, persiapan pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, mekanisme pembayaran, dan faktor lainnya. Dari segi perencanaan keuangan dan kegiatan, anggaran tidak mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dikarenakan pengalokasian anggaran belanja yang kurang wajar, efisien, dan relevan dengan output/outcome yang direncanakan [1]. Dari segi pelaksanaan, anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan jadwal/rencana kegiatan maupun kebutuhan idealnya, realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana, serta penyerapan anggaran yang rendah, jauh dari pola ideal serta cenderung tidak proporsional dan menumpuk di akhir tahun dan ini masih dianggap sebagai sebuah kelaziman tahunan [2].

Dalam konteks pemerintah, anggaran belanja pemerintah seharusnya digunakan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan mampu menggerakkan roda perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat [3]. Hingga pertengahan triwulan III Tahun Anggaran 2020, secara nasional realisasi belanja Negara sampai dengan akhir Agustus 2020 sebesar Rp.1.534.66 triliun atau sekitar 56.03 persen dari pagu sesuai Perpres 72/2020. Secara nominal, realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan Agustus 2020 tumbuh sebesar 13.97 persen (yoy) dari tahun sebelumnya. Secara umum, realisasi belanja negara pada tahun 2020 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema Ekonomi Islam

Belanja negara yang cenderung meningkat dan pendapatan negara yang cenderung menurun mengakibatkan Sri Mulyani, Menteri Keuangan, melakukan pemblokiran anggaran kementerian/lembaga sebesar 5%. Hal ini dilakukan untuk menyerap shock luar biasa akibat pandemi di 2021-2022. APBN kementerian/lembaga dialihkan untuk kepentingan seperti program bantuan sosial (bansos). Begitupun pada 2022-2023, dimana situasi ekonomi global yang tak menentu turut mengganggu pasar domestik. Terlebih, isu resesi hingga penurunan harga komoditas yang selama ini jadi andalan negara juga harus dipantau [4]. Sampai Maret 2023, Pemerintah Daerah baru belanja 10,2% dari total APBD-nya, hal ini lebih rendah dari pemerintah pusat yang sudah mencapai 15,5% [5].

Maka dari itu, tahapan penyusunan anggaran memegang peranan penting dikarenakan pada tahap penyusunan anggaran, pemerintah daerah dapat mencapai tujuan fiskal, meningkatkan koordinasi, membantu efisiensi, keadilan dan transparansi dalam lingkungan serta membantu pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan prioritas belanja [6]. Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia juga mengakibatkan perubahan pola pertanggungjawaban daerah atas pengalokasian dana yang dianggarkan oleh daerah [7]. Meskipun otonomi daerah saat ini masih belum terwujud secara signifikan [8]. Kesalahan penyusunan anggaran akan menyebabkan defisit anggaran atau kelebihan anggaran. Seperti yang terjadi Pemerintah Kabupaten Bogor yang melakukan refocusing anggaran karena mengalami defisit anggaran lebih dari Rp 300 miliar yang menyebabkan program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 belum dapat dilaksanakan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program secara efektif, efisien, dan ekonomis (*value for money*).

Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program yang diusulkan, mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Anggaran dengan pendekatan prestasi kerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja pada dasarnya dilakukan sejak pemerintah daerah mengajukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran. Sementara (PPAS) harus ditentukan secara tegas mengenai besaran hasil dan outputnya. Namun, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja akan terlihat secara operasional pada saat SKPD mengajukan RKA-SKPD. Untuk mengimplementasikan

anggaran berdasarkan prestasi kerja, pemerintah daerah perlu melengkapi instrumen seperti capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Agar anggaran dipahami sebagai strategi keuangan untuk mengalokasikan sumber daya organisasi untuk memenuhi tujuannya [9].

Istilah Analisis Standar Belanja (ASB) diperkenalkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Analisis Standar Belanja (ASB) mempunyai maksud dan istilah yang sama dengan Standar Analisa Belanja (SAB). Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang mendasari ASB yaitu Peraturan pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam regulasi-regulasi tersebut disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja [10]. Namun, ASB yang diamanatkan dalam regulasi-regulasi tersebut belum menunjukkan secara riil dan operasional tentang ASB sehingga ASB menjadi sesuatu yang abstrak bagi pemerintah daerah di Indonesia.

ASB merupakan salah satu cara memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga mengurangi perilaku pemborosan anggaran dan meningkatkan efisiensi anggaran [11]. ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja [12]. Ketidakhadiran wujud ASB secara riil pada pemerintah daerah menimbulkan berbagai macam masalah dalam penyusunan APBD. Masalah klasik dalam penyusunan APBD diantaranya penentuan anggaran dilakukan secara incremental yaitu penentuan besaran anggaran hanya dengan menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang telah ada. ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran [13].

Penelitian terdahulu yang mengkaji penerapan ASB belum banyak dilakukan sementara pemerintah daerah dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja perlu melengkapi instrumen analisis standar belanja dalam penyusunan anggaran. Penyusunan ASB sangat penting dilakukan pada pemerintah daerah, karena dalam penganggaran keuangan daerah sering ditemukan berbagai masalah yaitu kesulitan untuk menilai kewajaran beban kerja atas suatu kegiatan sejenis antar program/kegiatan dan antar SKPD; dalam proses penyusunan dan penentuan anggaran menjadi suatu hal yang bersifat subjektif; adanya ketidakadilan dalam mengalokasikan besaran anggaran untuk dua atau lebih kegiatan yang sama; aparat pemerintah daerah tidak memiliki argumen yang kuat jika dituduh melakukan pemborosan, dan proses penyusunan anggaran sering kali tertunda dan membutuhkan waktu yang lama. Hal-hal tersebut menjadikan konsep ASB sangat penting diterapkan

dalam pemerintah daerah. Konsep ASB masih sangat jarang diterapkan pada pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia karena masih sangat sedikit referensi yang mengacu pada konsep ASB sehingga masih banyak daerah yang belum mengetahui proses penyusunan ASB. Penelitian-penelitian yang terkait ASB juga masih jarang dilakukan. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan menganalisis kewajaran dari pengalokasian anggaran berdasarkan metode analisis standar belanja yang merujuk kepada penelitian [14].

ASB dapat memastikan hubungan kegiatan dengan aktivitas dan beban kerja yang sama seharusnya mendapatkan total biaya/belanja yang sama [15]. Menentukan kewajaran biaya dan beban kerja untuk melaksanakan kegiatan sehingga hal itu dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran. Penerapan ASB dalam pengelolaan keuangan akan mampu mengurangi ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar perangkat daerah [16]. Kewajaran biaya adalah biaya per komponen atau biaya total yang wajar untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu atau untuk menghasilkan satuan output tertentu. Dalam melakukan penilaian kewajaran biaya hal-hal yang harus dilakukan adalah menghitung rata-rata, batas bawah, dan batas atas sesuatu kegiatan ASB yang disusun berdasarkan persamaan yang telah disusun.

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian terdahulu menyatakan persentase atau alokasi masing-masing belanja terhadap total belanja memiliki nilai maksimum yaitu pada kegiatan atau belanja [17]. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan memiliki nilai minimum yaitu pada kegiatan pembulatan gaji. Model ASB yang terbentuk sebaiknya digunakan untuk penyusunan, evaluasi, dan pengendalian besaran anggaran kegiatan di Pemerintahan Daerah [18].

Beban kerja adalah komponen belanja yang mencerminkan tahapan pelaksanaan kegiatan, terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal yang dapat menyelesaikan suatu kegiatan tertentu atau untuk menghasilkan satuan output tertentu. Terkait dengan peraturan di atas, maka seluruh daerah berkewajiban menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) dalam menilai kewajaran suatu anggaran tanpa terkecuali Pemerintah Kota Padang [19]. Sistem ASB juga sebaiknya dikembangkan agar terciptanya anggaran yang efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Padang karena Kota Padang baru akan menerapkan ASB ini pada tahun anggaran 2024. Sehingga peneliti akan menganalisis kewajaran anggaran belanja pada SKPD Pemerintah Kota Padang pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan metode ASB.

Prinsip anggaran berbasis kinerja secara teori adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan

(*output dan outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Anggaran berbasis kinerja sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja. Anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi [20].

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau program atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Anggaran berbasis kinerja juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah di Kota Padang.

Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (*over spending*). Hal ini akan menimbulkan efek ratchet efek ratchet dalam anggaran belanja. Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal *cost awareness*, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost minded dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolok ukur sebagai standar kinerja. Selain itu, sumber daya juga menjadi faktor untuk pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kampanye implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik gencar dilakukan

seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan *good governance*. Implementasi konsep *value for money* diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa penerapan *value for money* dalam menilai kinerja organisasi sektor public dengan mengukur ekonomi, efektif, dan efisiennya.

Analisa Belanja Umum menjelaskan bahwa Analisis standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Terdapat dua hal penting dalam pengertian tersebut yakni kewajaran atas beban kerja dan kewajaran biaya. Kewajaran yang dimaksud adalah kewajaran penganggaran atas suatu kegiatan, sehingga orientasi standar ini ditujukan pada kegiatan yang diusulkan. Menurut Tim Penyusunan ASB Universitas Andalas penyusunan ASB seharusnya dilakukan pada awal setiap proses penyusunan anggaran. Hal ini karena ASB dibutuhkan oleh SKPD sebagai pedoman dalam mengajukan jumlah anggaran belanja untuk suatu kegiatan yang terangkum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Dengan berpedoman kepada ASB, SKPD dapat menyusun anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang baik yang salah satunya dengan memperhatikan faktor kewajarannya. Di sisi sebaliknya, TAPD dengan berpedoman kepada ASB dapat dengan baik pula mengevaluasi kewajaran atas anggaran yang diusulkan oleh masing-masing SKPD. Model ASB yang terbentuk sebaiknya digunakan untuk penyusunan, evaluasi dan pengendalian esaran anggaran kegiatan di Pemerintahan Daerah.

2. Metode Penelitian

Menurut modul analisis standar belanja PSKD untuk menghasilkan ASB yang layak dan dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang maka dilakukan beberapa tahapan kegiatan. Tahap pengumpulan data merupakan tahap pengambilan data berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk tahun 2022 ke setiap SKPD pada Pemerintah Kota Padang. Penggunaan regresi sederhana dalam menyusun ASB berguna untuk membuat model (persamaan) regresi untuk peramalan belanja dari suatu kegiatan. Peramalan belanja dengan model regresi ini dengan cara menghitung belanja rata-rata, menghitung batas minimum belanja, dan batas maksimum belanja, serta menghitung persentase alokasi kepada masing-masing objek belanja. Dalam menentukan nilai persamaan regresi ini dibantu dengan menggunakan program SPSS.

Inventarisasi data merupakan kegiatan menginput data seluruh kegiatan belanja langsung dari DPA ke dalam file microsoft excel. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang berulang dalam suatu SKPD atau kegiatan yang terjadi pada beberapa SKPD. Inventarisasi data ini juga

bermanfaat untuk memudahkan pengolahan data kegiatan untuk tahap berikutnya. Data anggaran di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diinputkan dalam kolom tersendiri berdasarkan alokasi belanja masing-masing jenis kegiatan.

Cost driver merupakan faktor pemicu besarnya jumlah biaya yang terjadi dalam suatu aktivitas. Misalnya besarnya biaya pelatihan akan dipicu (merupakan *cost driver*) oleh jumlah peserta serta lamanya pelatihan. *Cost driver* berbeda-beda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. Untuk menentukan *cost driver* dapat dilakukan dengan membandingkan pemicu biaya yang mengakibatkan suatu biaya berubah pada kegiatan yang sama.

Diagram pencar atau diagram serak (*scatter plot*) merupakan alat berupa diagram yang digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y melalui penggambaran nilai dari variabel-variabel tersebut. Diagram pencar menggunakan sistem koordinat cartesius. Pada koordinat tersebut, pada sumbu X diletakkan nilai variabel bebas dan pada sumbu Y diletakkan nilai variabel terikat (Y). Tujuan diagram pencar untuk mengetahui apakah titik-titik koordinat diagram membentuk pola tertentu. Dalam diagram selanjutnya ditarik suatu garis yang dapat membagi dua titik koordinat pada kedua sisinya. Garis yang ditarik diupayakan sesuai menggambarkan kecenderungan data yang tersebar (*garis best fit*).

Dari garis tersebut dapat diketahui korelasi antara dua variabel sekaligus arah atau bentuk hubungan. Jika garis naik artinya hubungan positif dan jika arah garis turun maka jenis hubungan negatif. Selain itu jika antara dua variabel bebas dan variabel terikat membentuk atau mendekati garis lurus, maka data tersebut bersifat linear. Sebaliknya jika data antara variabel bebas dan variabel terikat tidak membentuk atau mendekati garis lurus, maka data tersebut tidak bersifat linear. Dapat disimpulkan dalam melakukan pengujian menggunakan diagram *scatter plot* ini syarat-syaratnya adalah adanya hubungan positif antar dua variabel dan data bersifat linear.

Pada tahap penyusunan model analisis standar belanja untuk masing-masing kegiatan ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut menentukan persentase rata-rata, batas atas, dan batas bawah. Setelah tahap persamaan regresi yang didapat untuk mencari total anggaran yang dibuat berdasarkan *cost driver* masing-masing. Tahap berikutnya adalah menentukan persentase yang akan menjadi acuan tim penyusunan anggaran dalam menentukan nilai rincian alokasi belanja kegiatan tersebut. Setiap rincian alokasi belanja akan diberikan acuan rata-rata, batas atas dan batas bawah yang akan diolah dari data yang ada. Untuk menentukan nilai persentase rata-rata, batas atas dan batas bawah tersebut digunakan persamaan.

Menentukan persamaan regresi dari setiap ASB Analisis regresi (*regression analysis*) merupakan

metode statistik untuk memperoleh persamaan estimasi biaya unik yang paling sesuai bagi sekumpulan titik data. Adapun persamaan regresi dapat terlihat pada persamaan, yaitu: $Y = A + B(X)$. Dimana Y merupakan total belanja anggaran. A adalah biaya tetap (*fixed cost*), B adalah biaya variabel (*variable cost*) dan X adalah pemicu biaya atau yang menjadi *cost driver* pada kegiatan ini.

3. Hasil dan Pembahasan

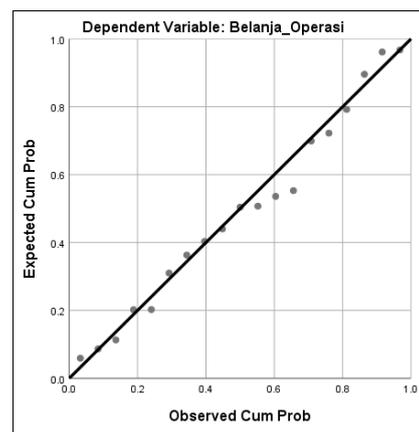
Langkah-langkah dalam analisis kewajaran belanja dimulai dari pembuatan model ASB. Tahap pembuatan model ASB yaitu tahap mengumpulkan dan pemilihan data, tahap pencarian pemicu belanja/biaya (*cost driver*), tahap pencarian belanja/biaya tetap (*fixed cost*) dan belanja/biaya variabel (*variable cost*), tahap penentuan nilai rata-rata, batas bawah (*minimum*), dan batas atas (*maksimum*), dan tahap analisis kewajaran biaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) atau Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran (DPPA) SKPD pada Pemerintah Kota Padang tahun 2022 yang terdiri dari 43 SKPD, namun dikarenakan keterbatasan data, maka penelitian ini hanya menggunakan 23 SKPD. Pembuatan model ASB ini dilakukan pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Tahap Pengumpulan data kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data terkait dengan kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dilaksanakan oleh aparatur dalam bentuk Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) atau Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran (DPPA) pada tahun anggaran 2022 pada Pemerintah Kota Padang. Berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut selanjutnya melakukan pengelompokan data dalam bentuk tabel pada Microsoft Excel. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan yang berulang pada suatu SKPD atau kegiatan yang terjadi dari beberapa SKPD. Berdasarkan penjelasan anggaran berbasis kinerja ASB yang disusun adalah berdasarkan kegiatan yang melakukan belanja langsung saja. Setelah dikumpulkan terdapat 19 data yang layak diolah pada ASB Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Dari data yang telah diinput ke dalam Microsoft Excel, kemudian dilakukan penyetaraan data. Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk mengelompokkan berbagai kegiatan dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki pola dan kemiripan yang sama dengan nilai belanja yang sepadan.

Menentukan *cost driver* kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Berdasarkan pengamatan data yang dikumpulkan, maka ditetapkan *cost driver* untuk ASB kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

adalah jumlah dokumen/laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. *Cost Driver* menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah dokumen yang dihasilkan maka semakin besar juga beban belanja yang akan dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan ASB Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, begitu juga sebaliknya. Setelah menentukan *cost driver* pada ASB, selanjutnya adalah menghitung berapa *cost driver* di setiap kegiatan. Untuk menganalisis dan mendapatkan nilai *cost driver* yang tepat.

Melakukan pengujian dengan menggunakan diagram pencar/*scatter plot* kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Langkah selanjutnya adalah menyeleksi data yang tepat untuk dimasukkan kedalam model ASB Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Dalam melakukan kegiatan ini kita dapat menggunakan diagram pencar/*scatter plot* untuk melakukan pengujian data. Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan diagram pencar/*scatter plot*, maka terbentuklah hubungan antara variabel x (*cost driver*) dan variabel y (*total belanja*). Namun jika pada diagram tersebut terdapat sebaran data yang tidak layak yang dapat merusak model ASB yang diinginkan, maka data tersebut akan dihapuskan dalam menganalisis ASB Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Selanjutnya setelah tertinggal data yang layak maka dilakukan sekali lagi pengujian dengan menggunakan diagram pencar/*scatter plot* ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram Pencar/*Scatter Plot*

Dari gambar di atas terlihat bahwa data sudah tersebar dengan baik dan tidak ada data terpencil atau tidak layak, sehingga data tersebut layak untuk dimasukkan untuk membuat model/persamaan regresi. Penyusunan Model ASB Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Langkah-langkah dalam menyusun ASB Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD membuat persamaan regresi analisis regresi adalah salah satu metode yang menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel penyebab

sering kali digambarkan dalam grafik sebagai sumbu x dan variabel akibat digambarkan dengan sumbu y. Variabel bebas adalah sumbu x dan variable tidak bebas adalah cost driver, sedangkan variabel tidak bebas adalah biaya dari suatu kegiatan. Adapun hasil yang diperoleh dari pengelolaan data ASB Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan menggunakan program SPSS disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengolahan Data Model ASB

Model	Coefficients ^a		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error		
(Constant)	7116556.351	1965446.763	3.621	.002
1 Jumlah_Dokumen	86034.952	182570.005	.471	.643

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa belanja Tetap (a): 7.116.556. Belanja Variabel (b) : 86.035. Signifikansi (Sig) : 0,03621. Pastikan nilai signifikansi (Sig.) memiliki nilai di antara 0,000 sampai dengan 0,050. Nilai koefisien regresi layak digunakan apabila nilai signifikansi maksimum atau paling besar 0,050 atau 5%. Nilai signifikansi pada kegiatan ini lebih kecil dari 0,05 atau 5%, sehingga data dalam penelitian ini dignifikan dan sudah sesuai dengan persyaratan kelayakan koefisien yang memiliki Tingkat keyakinan yang cukup tinggi serta siap digunakan. Berdasarkan model di atas, didapatkan persamaan/model ASB untuk menentukan total anggaran pada jenis ASB Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang terlihat pada persamaan (2) sebagai berikut $Total\ Belanja = Rp\ 7.116.556 + 86.035 (x)$. Dimana X = Jumlah Dokumen/Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD. Menentukan persentase alokasi belanja rata-rata, batas bawah, dan batas atas.

Alokasi total belanja ASB Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dapat dilakukan berdasarkan persamaan 2, adapun penentuan persentase batasan alokasi belanja untuk total belanja jenis kegiatan ASB Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merujuk pada penelitian yang menggunakan standar deviasi sebesar 25%. Perhitungannya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perhitungan Rata-Rata, Batas Bawah, dan Batas Atas ASB

Nama Alokasi Belanja	Total Alokasi Belanja	Rata-Rata	%	Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	$(3)=(2)/(7) * 100\%$	(4)	$(5)=(3)-\{(4)*(3)\}$	$(5)=(3)+\{(4)*(3)\}$
Belanja Barang	Rp93.052.932	61,7%	25%	46,2%	77,1%
Belanja Jasa	Rp17.920.000	11,9%	25%	8,91%	14,8%
Belanja Perjalanan Dinas	Rp39.900.000	26,4%	25%	19,8%	33,1%
Total Belanja (7)	Rp150.872.932	100%			

ASB Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ini seperti yang terlihat pada tabel 2 hanya mengalokasikan objek

belanja untuk belanja barang, belanja jasa, dan belanja perjalanan dinas. Suatu kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang pelaksanaannya akan memasukkan objek belanja selain dari yang tersebut di atas, maka dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri dengan persetujuan Tim Evaluasi Anggaran. Tabel Batasan alokasi belanja di atas merupakan acuan untuk memudahkan alokasi belanja dalam jenis kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Persentase yang didapatkan dari olahan data tersebut ditujukan jika akan dianggarkan suatu kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Hal ini memudahkan Tim Penyusunan Anggaran Kota Padang dalam mengalokasikan ataupun mengevaluasi kelayakan belanja untuk kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Untuk informasi tambahan bahwa standar deviasi sebesar 25% bisa berubah sesuai dengan kesepakatan dengan SKPD terkait.

Analisis Pengujian Kewajaran biaya dan beban kerja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Pada tahap ini adalah melakukan penilaian kewajaran atas biaya dan beban kerja yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dalam penilaian kewajaran beban kerja aspek yang diperhatikan adalah kaitan logis antara kegiatan yang diusulkan dengan sasaran pembangunan, kesesuaian antara program dan kegiatan yang diusulkan, dan kemampuan SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan tingkat pencapaian yang diinginkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan aspek yang diperhatikan dalam penilaian kewajaran biaya adalah kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja, kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku, dan kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja dengan sumber daya.

Berdasarkan persamaan model ASB yang telah didapatkan untuk kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dari 19 SKPD yang diteliti terdapat 5 SKPD yang underfinancing, 6 SKPD yang overfinancing, dan 8 SKPD yang mendapatkan nilai wajar. Dikatakan underfinancing jika total belanja yang telah direalisasikan lebih rendah dari batas bawah yang telah ditetapkan, dikatakan overfinancing jika melebihi batas atas yang telah ditetapkan, dan dikatakan wajar jika berada pada rentang batas bawah dan batas atas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan adalah model ASB untuk kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Total Belanja = Rp 31.257.570–999.936 (Jumlah Dokumen/Laporan yang dihasilkan). Berdasarkan model ASB tersebut, masih

terdapat 5 SKPD yang termasuk kategori underfinancing, 6 SKPD yang termasuk kategori overfinancing, dan 8 SKPD yang termasuk kategori wajar. Bagi Pemerintah Kota Padang yang akan menerapkan model ASB pada tahun 2024, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pembuatan model ASB pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Hal ini diperlukan untuk menghindari kemungkinan overfinancing yang dapat membebani anggaran maupun underfinancing yang dapat menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat berjalan maksimal karena kurangnya anggaran. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Padang tahun anggaran 2022. Penelitian ini bisa dilakukan di Kota lainnya yang belum memiliki acuan khusus yang diterapkan secara optimal dalam penganggaran kegiatan-kegiatan yang sering dilaksanakan dan spesifik oleh SKPD.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang atas dana hibah yang telah diberikan, LPPM Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dan BPKAD Kota Padang yang telah mendukung moril dan data penelitian.

Daftar Rujukan

- [1] A. D. Indriyani and W. S. Yuliandhari. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris pada Perusahaan indeks LQ 45 Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *J. Akunt. Bisnis dan Ekon.*, 6, pp. 1559–1568. DOI: <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.466> .
- [2] N. Picičia, Wahidin, and Wahyunadi. (2023). Analisa Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah dan Kesenambungan Penyelenggaraan Layanan Publik. *J. Ilmu Ekon.*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.59827/jie.v2i2.84> .
- [3] R. Y. Dai, Z. Boki, and M. Mahmud. (2023). Analisis Standar Satuan Harga (SSH) Pada Penyusunan Anggaran. *SEIKO : Journal of Management & Business Analisis Standar Satuan Harga (SSH) Pada Penyusunan Anggaran Belanja Bimtek (Studi Kasus Badan Keuangan Kota Gorontalo)*. *SEIKO J. Manag. Bus.*, 6(2), pp. 236–245. DOI: <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i2.4768> .
- [4] M. Trisilia. (2016). Analisis Standar Belanja untuk Penyusunan RKA-APBD Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan (Studi Pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015). *J. Manaj. dan Bisnis Indonesia*, 4(1), pp. 147–158. DOI: <https://doi.org/10.31843/jmbi.v4i1.108> .
- [5] K. S. Syafis and A. S. Irawan. (2014). Evaluasi Kewajaran Pembelanjaan Daerah dengan Menggunakan Analisis Standar Belanja (Studi Pada Pemerintah Kota Jambi). *Account. Bus. Inf. Syst. J.*, 2(2), pp. 1–12. DOI: <https://doi.org/10.22146/abis.v2i2.59366> .
- [6] T. Cahyono. (2014). Perancangan Basisdata Sistem Informasi Perhitungan Asb (Analisis Standar Belanja) Pemerintahan Daerah. *Agustus*, 7(2), p. 60. DOI: <https://doi.org/10.35671/telematika.v7i2.250> .
- [7] Z. Putra and I. P. G. Diatmika. (2021). Pendampingan Penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. *BERNAS J. Pengabd. Kpd. Masy.*, 2(2), pp. 610–618. DOI: <https://doi.org/10.31949/jb.v2i2.1006> .
- [8] D. Djefris, E. Rosalina, Rasyidah, A. W. Ahmad, F. Misra, and J. A. E. Putri. (2021). Analisis Standar Belanja (ASB) Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. *Akunt. dan Manaj.*, 16(2), pp. 50–67. DOI: <https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.116> .
- [9] M. F. Agustina. (2020). Analisis Model Analisis Standar Belanja (Studi Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta). *ABIS Account. Bus. Inf. Syst. J.*, 6(4). DOI: <https://doi.org/10.22146/abis.v6i4.58803> .
- [10] U. Nas, M. Suun, and F. Nasaruddin. (2020). Analisis Standar Belanja dan Kewajaran Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. *Bongaya J. Res. Account.*, 3(2), pp. 76–82. DOI: <https://doi.org/10.37888/bjra.v3i2.227> .
- [11] T. Winerungan, V. A. Rimate, and E. N. Walewangko. (2018). Kasus Inspektorat Kota Bitung). *J. Pembangunan Ekon. dan Keuang. Drh.*, 19(2), pp. 2015–2017. DOI: <https://doi.org/10.35794/jpekd.19788.19.6.2018> .
- [12] Husin, Nurwati, Rostin, and A. Achmad. (2022). Pelatihan Perhitungan Analisis Standar Satuan Belanja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bombana. *J-Abdi J. Pengabd. Kpd. Masy.*, 1(10). DOI: <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i10.1624> .
- [13] B. N. Pradipta, L. Susilowati, and H. Haq. (2020). Implementasi Software AxataPOS dalam Memenuhi Kebutuhan Sistem Informasi Akuntansi Pada Klinik Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Bisnis Syariah. *J. Imara*, 4(2), pp. 133–145. DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/imara.v4i2.2376> .
- [14] S. Sumiati, H. W. Apriyanti, and K. Fuad. (2021). Model Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Kudus dalam Menunjang Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan APBD. *INVEST J. Inov. Bisnis dan Akunt.*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.55583/invest.v2i2.158> .
- [15] M. Yusuf, R. Rahmawati, and A. Aswar. (2020). Penyusunan Analisis Standar Belanja Pembangunan Gedung dan Rehabilitasi Ruang Kelas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2019. *Reson. J. Ilm. Pengabd. Masy.*, 3(2), pp. 9–16. DOI: <https://doi.org/10.35906/resona.v3i2.386> .
- [16] W. Anggita. (2017). Pengaruh Analisis Standar Belanja, Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang). *ACCOUNTHIK J. Account. Financ.*, 2(1), pp. 314–324. DOI: <https://doi.org/10.35706/acc.v2i01.734> .
- [17] N. H. Israr and E. Syofyan. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *J. Eksplor. Akunt.*, 4(4), 2022, DOI: <https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.550> .
- [18] C. Kuntadi and E. Velayati. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. *Fair Value J. Ilm. Akunt. dan Keuang.*, 5(4). DOI: <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2830> .
- [19] F. D. Lombi, Haliah, Nirwana, and A. Fahdal. (2022). Application of Value for Money in Assessing in Public Sector Hospitals: A Systematic Literature Review. *JEINSA J. Ekon. Sidenreng Rappang*, 1(2). DOI: <https://doi.org/10.61912/jeinsa.v1i02.12> .
- [20] Jiang, H. (2023). Discussion on Key Technologies of Big Data In Financial Budget Performance Management In Low-Carbon Economy. *Frontiers in Energy Research*, 10. DOI: <https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.1080595> .